

RENJA (RENCANA KERJA) 2020



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
Jl. Kol. Wahid Udin Lk. I No. 239 Kel. Serasan Jaya
SEKAYU - MUSI BANYUASIN - SUMATERA SELATAN
Telp. (0714) 321035 Fax. (0714) 322535

KATA PENGANTAR


Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditegaskan bahwa, pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan membutuhkan mekanisme perencanaan yang dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan pembangunan dalam berbagai tingkatan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terfokus dalam rencana tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari yang diharapkan semula.

Akhirnya semoga Rencana Kerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya *good governance* di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 2019

**INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Drs. H. R. E. AIDIL FITRI
Pembina Utama Muda
NIP 19681220 198810 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	9
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN	20
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	23
3.2.1 Tujuan	23
3.2.2 Sasaran	24
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	39
BAB V PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

- Tabel Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja & Pencapaian Renstra s/d 2019..... 8
- Tabel Tabel Analisi Kinerja..... 9
- Tabel. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 13
- Tabel. Rencana Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah..... 41

BAB I **PENDAHULUAN**

1

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk Rencana lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah disebut Renstra OPD dan untuk rencana tahunan OPD disebut Rencana Kerja OPD (Renja OPD).

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan rencana kerja tahunan yang juga merupakan penjabaran Renstra Inspektorat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran Renstra OPD setiap tahunnya yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) OPD akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD satu tahun ke depan.

Dengan demikian OPD dapat menentukan besaran anggaran yang diperlukan dalam upaya melaksanakan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara bertahap akan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra-OPD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berusaha semaksimal mungkin agar dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab secara efisien dan efektif sehingga fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, keberadaan dan eksistensi benar-benar dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan dalam mewujudkan ***good and clean governance***.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati Musi Banyuasin.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 67)
8. Peraturan Bupati Nomor 03 tentang Pedoman Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019, Nomor 03)

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam melakukan tugas selama satu tahun kedepan, perencanaan kegiatan terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada.

1.Maksud

Maksud disusunnya rencana kerja ini adalah sebagai media program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.

2.Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel;
- b. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur pengawas dalam perumusan substansi pengawasan tahunan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisisensi pengawasan dengan mengacu pada Renstra Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018-2023 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang;
- c. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;
- d. Sebagai upaya mengakomodir kebijakan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi dan sektor lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB I :** **PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II :** **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**
- 1.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Muba tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Kab. Muba
 - 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 1.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kab. Muba
 - 1.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III :** **TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
- 1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 1.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab. Muba
 - 1.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV :** **RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB IV :** **PENUTUP**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KAB.MUBA TAHUN LALU

2

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

TABEL. 2.1

Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Muba dan Pencapaian Renstra s/d 2019

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Transaksi Tahun ke-			Target Program dan Kegiatan (Renja ITDA Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2018	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2019	Tingkat capaian target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
4	Urusan Pemerintah Fungsi Penujang									
4.02	Pengawasan									
4.02.01	Inspektorat									
4.02.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Leveling Kapabilitas APIP	Level 1		Level 2	Level 2	100 %	Level 3	Level 3	100 %
		Skor Maturitas SPIP	1,5		3,0	3.06	100 %	3,0	3,0	100 %
		Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP Minimal B	50%		60 %	54.2%	90,33%	70 %	70 %	100 %
		Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP		WTP	WTP	100 %	WTP	WTP	100 %
		Skor Penilaian Mandiri (Self Assement) atas pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di Instansi masing-masing	C		C	C	100 %	C	C	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kab. Muba

Sesuai dengan dokumen RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel Analisa Kinerja . 2.2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					Transaksi Tahun ke-
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menjadikan aparat pengawasan intern pemerintah yang dapat berperan sebagai catalyst, consulting partner dan quality assurance	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Leveling Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Terciptanya sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) daerah yang profesional	Skor Maturitas SPIP	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintah an yang baik dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP Minimal B	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	85 %
			Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan mampu melayani	Skor Penilaian Mandiri (Self Assesment) atas pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di Instansi masing-masing	C	C	C	C	CC	B

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/ kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

- a. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Mekanisme kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi
- d. adanya kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah (PD) terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- e. Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat

- a. Jumlah obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) Aparatur Pengawasan.
- b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi pengawasan.
- c. Jumlah Anggaran untuk kegiatan Pengawasan masih terbatas.

d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum diterapkan pada masing-masing Perangkat Daerah (PD).

e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkakan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin tidak terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupnya. Isu-isu strategis dimaksud adalah :

1. Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan Optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai peran *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang cukup.
3. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik.

4. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 B, walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kabupaten Musi Banyuasin masih berbenah untuk dapat mempertahankan nilai tersebut atau meningkat.
5. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Inspektorat yang memiliki sertifikasi Pengawasan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil reuiu terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2020, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

TABEL. 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
.....15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					10.242.350.000	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					10.242.350.000
15.02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Kab. Muba	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat	50 LHP	1.200,000,000	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Kab. Muba	Ditindaklanjuti nya Pengaduan Masyarakat	50 LHP	1.200,000,000		
15.09	Pemeriksaan Sekolah Negeri dan Swasta	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Sekolah	60 LHP	1.200,000,000	Pemeriksaan Sekolah Negeri dan Swasta	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Sekolah	60 LHP	1.200,000,000		
15.10	Pemeriksaan OPD	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah	43 LHP	650,000,000	Pemeriksaan OPD	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah	43 LHP	650,000,000		
15.11	Evaluasi SAKIP	Kab. Muba	Persentase PD yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal B	1 LHE	100,000,000	Evaluasi SAKIP	Kab. Muba	Persentase PD yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal B	1 LHE	100,000,000		
15.12	Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Internal	Kab. Muba	Jumlah tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan APIP, yang ditindaklanjuti	2 TLHP	350,000,000	Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Internal	Kab. Muba	Jumlah tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan APIP, yang ditindaklanjuti	2 TLHP	350,000,000		
15.13	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Muba	Laporan Keuangan Pemda yang sesuai SAP	1 LHR	100,000,000	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Muba	Laporan Keuangan Pemda yang sesuai SAP	1 LHR	100,000,000		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
15.14	Evaluasi Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	Kab. Muba	Jumlah tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK, yang ditindaklanjuti	2 TLHP	350.000.000	Evaluasi Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	Kab. Muba	Jumlah tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK, yang ditindaklanjuti	2 TLHP	350.000.000	
15.15	Pemeriksaan Khusus	Kab. Muba	Ditindaklanjutinya Jumlah Kasus Pada Pemerintah Daerah	45 LHP	1.000.000.000	Pemeriksaan Khusus	Kab. Muba	Ditindaklanjutinya Jumlah Kasus Pada Pemerintah Daerah	45 LHP	1.000.000.000	
15.16	Evaluasi LPPD	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LPPD	1 laporan	100,000,000	Evaluasi LPPD	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LPPD	1 laporan	100,000,000	
15.17	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Kab. Muba	Terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Kabuptaten	Level 3	200,000,000	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Kab. Muba	Terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Kabuptaten	Level 3	200,000,000	
15.18	Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Penggunaan Dana Desa	114 LHP	1,700.000.000	engawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Penggunaan Dana Desa	114 LHP	1,700.000.000	
15.19	Pengawasan dan Pembinaan PNS Terpadu	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan terhadap Disiplin ASN	10 Laporan	150,000,000	Pengawasan dan Pembinaan PNS Terpadu	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan terhadap Disiplin ASN	10 Laporan	150,000,000	
15.20	Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan TP. TGR	7 Kali Sidang	350,000,000	Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan TP. TGR	7 Kali Sidang	350,000,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
15.21	Review Dokumen Perencanaan Pembangunan & Penggangan Daerah	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	10 LHR	150,000,000	Review Dokumen Perencanaan Pembanguna & Penggangan Daerah	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	10 LHR	150,000,000	
15.23	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJIP Perangkat Daerah	1 LHR	100.000.000	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJIP Perangkat Daerah	1 LHR	100.000.000	
15.24	Peningkatan Kapabilitas APIP	Kab. Muba	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level 3	150.000.000	Peningkatan Kapabilitas APIP	Kab. Muba	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level 3	150.000.000	
15.25	Pengawasan Reformasi Birokrasi	Kab. Muba	Terlaksananya Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin	Nilai C	150,000,000	Pengawasan Reformasi Birokrasi	Kab. Muba	Terlaksananya Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin	Nilai C	150,000,000	
15.26	Pengawasan Terhadap Optimalisasi PAD	Kab. Muba	Tersedianya laporan hasil pengawasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	10 LHP	250,000,000	Pengawasan Terhadap Optimalisasi PAD	Kab. Muba	Tersedianya laporan hasil pengawasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	10 LHP	250,000,000	
15.27	Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas	Kab. Muba	Tersedianya Laporan hasil Pengawasan terhadap Dana Kapitasi Puskesmas	56 LHP	400,000,000	Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas	Kab. Muba	Tersedianya Laporan hasil Pengawasan terhadap Dana Kapitasi Puskesmas	56 LHP	400,000,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
15.28	Pemeriksaan serentak Kas Opname	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kas opname	15LHP	150,000,000	Pemeriksaan serentak Kas Opname	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kas opname	15LHP	150,000,000	
15.29	Evaluasi perencanaan penganggaran responsive Gender (PPRG)	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan Penganggaran responsif gender	1 Laporan	150,000,000	Evaluasi perencanaan penganggaran responsive Gender (PPRG)	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan Penganggaran responsif gender	1 Laporan	150,000,000	
15.30	Audit pengadaan barang dan jasa (PBJ)	Kab. Muba	Reviu Penyerapan Anggaran , Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	4 LHP	172.350.000	Audit pengadaan barang dan jasa (PBJ)	Kab. Muba	Reviu Penyerapan Anggaran , Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	4 LHP	172.350.000	
15.30	Penilaian Zona Integritas (ZI)	Kab. Muba	Terlaksananya Pilot Project Wilayah Bebas Korupsi	2 PD	100,000,000	Penilaian Zona Integritas (ZI)	Kab. Muba	Terlaksananya Pilot Project Wilayah Bebas Korupsi	2 PD	100,000,000	
15.31	Pengawasan Pungutan Liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Sosialisasi Terhadap Larangan Pungutan Liar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	150,000,000	Pengawasan Pungutan Liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Sosialisasi Terhadap Larangan Pungutan Liar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	150,000,000	
15.32	Pengendalian Gratifikasi	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100,000,000	Pengendalian Gratifikasi	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100,000,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
15.33	Evaluasi Pelayanan Publik	Kab. Muba	Tersedianya Laporan hasil Evaluasi terhadap Pelayanan Publik	10 Perangkat Daerah	150,000,000	Evaluasi Pelayanan Publik	Kab. Muba	Tersedianya Laporan hasil Evaluasi terhadap Pelayanan Publik	10 Perangkat Daerah	150,000,000	
15.34	Koordinasi TP4D	Kab. Muba	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Kerjasama MoU APIP dengan TP4D	4 Laporan	120.000.000	Koordinasi TP4D	Kab. Muba	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Kerjasama MoU APIP dengan TP4D	4 Laporan	120.000.000	
15.35	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK-ASN)	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi ASN Pemkab Muba	1 Laporan	120.000,000	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK-ASN)	Kab. Muba	Tersedianya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi ASN Pemkab Muba	1 Laporan	120.000,000	
15.36	Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Verifikasi Laporan RADPPK	Kab. Muba	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Verifikasi RAD PPK	4 Laporan	100.000.000	Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Verifikasi Laporan RADPPK	Kab. Muba	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Verifikasi RAD PPK	4 Laporan	100.000.000	
15.37	Penanganan Whistle Blower System	Kab. Muba	Terlaksananya Pengawasan Whistle Blower System	1 Laporan	50.000.000	Penanganan Whistle Blower System	Kab. Muba	Terlaksananya Pengawasan Whistle Blower System	1 Laporan	50.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
15.38	Gelar Pengawasan Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Gelar Pengawasan Kabupaten	2 Laporan	50.000.000	Gelar Pengawasan Daerah	Kab. Muba	Terlaksananya Gelar Pengawasan Kabupaten	2 Laporan	50.000.000	
15.39	Pengawasan Dana Perbantuan	Kab. Muba	Terlaksananya Penagwasan Dana Perbantuan	10 LHP	100.000.000	Pengawasan Dana Perbantuan	Kab. Muba	Terlaksananya Penagwasan Dana Perbantuan	10 LHP	100.000.000	
15.40	Penanganan benturan kepentingan	Kab. Muba	Terlaksananya Penanganan benturan kepentingan	1 Laporan	50.000.000	Penanganan benturan kepentingan	Kab. Muba	Terlaksananya Penanganan benturan kepentingan	1 Laporan	50.000.000	
15.41	Pelaksanaan Klinik KPK	Kab. Muba	Terlaksananya Klinik KPK	1 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Klinik KPK	Kab. Muba	Terlaksananya Klinik KPK	1 Laporan	100.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL. 2.5

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<i>TIDAK ADA USULAN</i>					

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menjadi tonggak reformasi pemerintahan daerah adar asas desentralisasi atau dikenal dengan era otonomi daerah, Sejalan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance and clean governance*), yang berfokus pada peningkatan pelayanan public dan peningkatan kapabilitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah, telah merubah paradigma fungsi pengawasan sebagai salah satu instrument manajemen birokrasi. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan fungsi pengawasan tidak lagi terkesan hanya mencari kesalahan saja (*watchdog*). Sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku, peran baru (***New Paradigm***) **Inspektorat Daerah Kabupaten** terbagi atas 2 (dua) peran, yakni :

1. Melaksanakan pengawasan atas urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, untuk menjamin agar Pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat sebagai wujud kontrol sosial.
2. Memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengawasan Intern melalui perwujudan peran APIP yang efektif.

(PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Salah satu agenda prioritas pembangunan nasional (NAWACITA) tahun 2015-2019 adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam wujud Reformasi birokrasi yang ditetapkan menjadi peraturan Nomor 18 Tahun 2010. Dioperasionalkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Tahun 2015-2019. Sasaran dengan arah kebijakan pemerintah daerah adalah berkenaan dengan fungsi pengawasan daerah sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah daerah adalah Penyelenggaraan tata kelola Pemerintah dengan Indikator Kinerja Opini WTP daerah tercapai 60 % pada Tahun 2018.

Sasaran dan Indikatornya tersebut dilaksanakan melalui program-program berorientasi hasil (*result oriented programs*) yakni :

1. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja target 100%

b. Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja target 100%

2. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH terdiri dari :

- a. Pemeriksaan Sekolah Negeri dan Swasta target 100%
- b. Pemeriksaan OPD target 100%
- c. Evaluasi SAKIP Kabupaten Musi Banyuasin target 100%
- d. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan hasil temuan Pemeriksaan Internal target 100%
- e. Reviu Laporan Keuangan Daerah 100%
- f. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal target 100%
- g. Pemeriksaan Khusus Kasus target 100%
- h. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) target 100%
- i. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPIP) target 100%
- j. Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Desa target 100%
- k. Pengawasan dan Pembinaan PNS Terpadu target 100%
- l. Pemantauan penyelesaian kerugian Negara/Daerah target 100%
- m. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah target 100%.
- n. Penanganan Pengaduan Masyarakat Target 100%
- o. Reviu LKJiP target 100%
- p. Peningkatan Kapabilitas APIP target 100%.
- q. Pengawasan Reformasi Birokrasi target 100%.
- r. Pengawasan Terhadap Optimalisasi PAD Target 100%.
- s. Pengawasan Pungutan Liar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Target 100%.

- t. Pencanaan dan fasilitasi Zona Integritas (ZI) Target 100%.
- u. Penanganan Whistle Blower System 100%.
- v. Gelar Pengawasan Daerah 100%.
- w. Pengawasan Dana Perbantuan 100%.
- x. Penanganan benturan kepentingan 100%.

3. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

- a. Penerapan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) target 100%.
- b. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan target 100%.

4. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Program ini didukung oleh 4 (Empat) kegiatan yaitu :

- a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan target 100%.
- b. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Khusus Pengawasan target 100%.
- c. Penilaian Angka Kredit Target 100 %
- d. Diklat Teknis Substansi Fungsional Pengawasan Target 100 %

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yaitu sebagai berikut:

1. Menjadikan aparat pengawasan intern pemerintah yang dapat berperan sebagai *catalyst*, *consulting partner* dan *quality assurance*.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Pencapaian sasaran diukur dengan Indikatornya kinerja sasaran. berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
2. Terciptanya sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) daerah yang profesional;
3. Tercapainya Zona Integritas pada Perangkat Daerah
4. Meningkatnya Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan mampu melayani.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran didukung oleh ketentuan-ketentuan maupun arahan dari pengambil keputusan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

a. Kebijakan Internal

1. Meningkatkan Level Kapabilitas APIP menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Meningkatkan penyertaan (mengirimkan) aparatur pengawasan pada kegiatan Diklat JFA dan Diklat/Bimtek pengawasan lainnya.
3. Memprioritaskan pembinaan dan pengawasan yang bersifat reguler pada pelayanan kepada masyarakat terutama sektor pendidikan dan kesehatan serta hal-hal lain yang merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Mendukung terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang amanah, bersih, jujur, profesional dan demokrasi.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung secara optimal.

b. Kebijakan Eksternal

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pengawasan Pemerintah seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi Sumsel, Inspektorat Daerah Kabupaten Kab/Kota dan lainnya.
2. Mengadakan Evaluasi SAKIP, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LPPD, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaksanaan SPM pada Organisasi Perangkat Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Mengadakan studi komparatif ke Inspektorat daerah lain yang dianggap lebih maju.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta program pendukungnya dapat dilihat secara rinci dalam lampiran I yaitu Matrik Rencana Kerja (Renja).

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini didukung oleh 13 (Tiga belas) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Terpenuhinya dukungan komunikasi, kebutuhan air dan listrik
 - Sumber Dana APBD
2. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - Target 100%
 - Terpenuhinya asuransi kendaraan dinas roda 4
 - Sumber Dana APBD
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Terpenuhinya dukungan biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan dinas
 - Sumber Dana APBD
4. Penyediaan alat tulis kantor
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran aktivitas kegiatan kantor
 - Sumber Dana APBD

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kelancaran aktivitas kegiatan kantor
 - Sumber Dana APBD
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Terpenuhiya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sumber Dana APBD
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Target 100%
 - Terpenuhiya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sumber Dana APBD
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Terpenuhiya kebutuhan peralatan rumah tangga untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor
 - Sumber Dana APBD
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Meningkatnya pengetahuan APIP tentang Perundang undangan yang berlaku
 - Sumber Dana APBD

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

- Target 100%
- Indikatornya adalah Terpenuhinya kebutuhan dan minuman untuk mendukung aktivitas kelancaran dan kegiatan kantor
- Sumber Dana APBD

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Target 100%
- Indikatornya adalah Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengawasan luar daerah
- Sumber Dana APBD

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

- target 100%
- Indikatornya adalah Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengawasan dalam daerah
- Sumber Dana APBD

13. Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis / perkantoran

- Target 100%
- Indikatornya adalah Terpenuhinya honorarium pegawai tidak tetap dan tenaga administrasi perkantoran
- Sumber Dana APBD

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini didukung oleh 3 (Tiga) kegiatan yaitu :

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional dan tersedianya dukungan BBM secara rutin/berkala
 - Sumber Dana APBD
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala
 - Sumber Dana APBD
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Target 100 %
 - Indikatornya adalah Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor secara rutin/berkala
 - Sumber Dana APBD

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Target 100%.
 - Indikatornya Adalah Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan pengendalian
 - Sumber Dana APBD

d. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program ini didukung oleh 2 (Dua) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Tersedianya hasil Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
 - Sumber Dana APBD
2. Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Tersedianya laporan hasil rancangan kerja dan penetapan kinerja
 - Sumber Dana APBD

e. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini didukung oleh 20 (Dua Puluh) kegiatan yaitu :

1. Pemeriksaan Sekolah Negeri dan Swasta
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Terlaksananya Pemeriksaan Sekolah Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Musi Banyuasin
 - Sumber Dana APBD
2. Pemeriksaan OPD
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Berkurangnya jumlah hasil pemeriksaan APIP pada Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
 - Sumber Dana APBD

3. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan hasil temuan Pemeriksaan Internal
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Meningkatnya persentase tindak lanjut LHP APIP
 - Sumber Dana APBD
4. Reviu Laporan Keuangan Daerah
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah
 - Sumber Dana APBD
5. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Meningkatnya persentase tindak lanjut LHP temuan BPK RI dan lembaga lainnya
 - Sumber Dana APBD
6. Pembinaan dan Pengawasan PNS Terpadu
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
 - Sumber Dana APBD
7. Pengawasan Reformasi Birokrasi
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi dan zona Integritas
 - Sumber Dana APBD

8. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Berkurangnya jumlah kerugian negara akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai
 - Sumber Dana APBD
9. Pengawasan terhadap Optimalisasi PAD
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Meningkatnya PAD Kabupaten Musi Banyuasin
 - Sumber Dana APBD
10. Evaluasi SAKIP
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Meningkatnya kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
 - Sumber Dana APBD
11. Pemeriksaan Khusus /kasus
 - Target 100%
 - Indikatornya adalah Terlaksananya Pemeriksaan terhadap Kasus pelimpahan dari APH/Eksternal serta, Pemeriksaan untuk tujuan tertentu
 - Sumber Dana APBD
12. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 - Sumber Dana APBD

13. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah Jumlah capaian penerapan SPIP
 - Sumber Dana APBD
14. Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah Berkurangnya KKN ditingkat Desa/Kelurahan di 14 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin
 - Sumber Dana APBD
15. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
 - Sumber Dana APBD
16. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah beserta perubahan
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah Terciptanya keselarasan antar Dokumen dan penerapan kaidah perencanaan pembangunan daerah
 - Sumber Dana APBD
17. Peningkatan Kapabilitas APIP
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah Meningkatnya Level Kapabilitas APIP
 - Sumber Dana APBD

18. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah Jumlah Dokumen Hasil Reviu LKjIP
 - Sumber Dana APBD
19. Pengawasan Pungutan Liar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah Menurunnya tingkat pungutan liar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Sumber Dana APBD
20. Pencanaan dan Fasilitasi Zona Integritas (ZI)
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah Jumlah Pilot Proyek Wilayah Bebas Korupsi
 - Sumber Dana APBD
21. Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah terlaksananya Dana Kapitasi Puskesmas Dalam Kab,. Muba
 - Sumber Dana APBD
22. Pemeriksaan Serentak Kas Opname
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah Terciptanya disiplin Aparatur dalam Adminitrasi Keuangan
 - Sumber Dana APBD

23. Evaluasi perencanaan penganggaran responsive Gender (PPRG)
- Target 100%.
 - Indikatornya adalah Terciptanya Evaluasi responsive Gender (PPRG)
 - Sumber Dana APBD
24. Pengendalian Gratifikasi
- Target 100%.
 - Indikatornya adalah menciptakan pengendalian Gratifikasi
 - Sumber Dana APBD
25. Evaluasi Pelayanan Publik
- Target 100%.
 - Indikatornya adalah meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang baik
 - Sumber Dana APBD
26. Koordinasi TP4D
- target 100%.
 - Indikatornya adalah terlaksananya koordinasi APIP dengan APH
 - Sumber Dana APBD
27. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK-ASN)
- Target 100%.
 - Indikatornya adalah tersedianya laporan harta kekayaan ASN dalam Kabupaten Musi Banyuasin
 - Sumber Dana APBD

28. Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Verifikasi Laporan RADPPK

- target 100%.
- Indikatornya adalah terlaksananya verifikasi laporan RAD PPK
- Sumber dana APBD

29. Penanganan Whistle Blower System

- Target 100%.
- Indikatornya adalah Terlaksananya Pengawasan Whistle Blower System
- Sumber dana APBD

30. Gelar Pengawasan Daerah

- Target 100%.
- Indikatornya adalah Terlaksananya Gelar Pengawasan Kabupaten
- Sumber dana APBD

31. Pengawasan Dana Perbantuan

- Target 100%.
- Indikatornya Terlaksananya Penagwasan Dana Perbantuan
- Sumber dana APBD

32. Penanganan benturan kepentingan

- Target 100%.
- Indikatornya Terlaksananya Terlaksananya Penanganan benturan kepentingan
- Sumber dana APBD

33. Pelaksanaan Klinik KPK

- Target 100%.
- Indikatornya Terlaksananya Klinik KPK
- Sumber dana APBD

f. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Program ini didukung oleh 2 (Dua) kegiatan yaitu :

1. Penerapan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP)
 - Target 100%.
 - Indikatornya adalah tersusunya data hasil pengawasan
 - Sumber Dana APBD
2. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - Target 100%.
 - Indikator adalah Terciptanya Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - Sumber Dana APBD

g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawas

Program ini didukung oleh 4 (Empat) kegiatan yaitu :

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - Target 100%.
 - Indikator adalah Meningkatnya kualitas pengawasan bagi aparatur pengawasan
 - Sumber Dana APBD
2. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Khusus Pengawasan
 - Target 100%.
 - Indikator adalah Jumlah Pemeriksa/Aparatur Pengawasan yang bersertifikat
 - Sumber Dana APBD

3. Penilaian Angka Kredit

- Target 100%.
- Indikator adalah terlaksananya Perhitungan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah
- Sumber Dana APBD

4. Diklat Teknis Subtansi Fungsional Pengawasan

- Target 100%.
- Indikator adalah Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan serta kualitas pengawasan bagi aparatur pemeriksaan dan aparatur pengawasan
- Sumber Dana APBD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin. Keduanya merupakan Penjabaran dari undang-undang 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demikian program kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA)

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam table 4.1 berikut ini



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tahun Perencanaan : 2020

Nama Organisasi (4.00.01.01) INSPEKTORAT

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Sasaran Prioritas
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
					Sumber Dana	Jumlah Pagu (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA TIDAK LANGSUNG						13,855,482,760			13,855,482,760	
BELANJA LANGSUNG						15,624,150,000			13,824,150,000	
1.01 01 4.00.01.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %		2,676,800,000		100 %	2,676,800,000	
1.01 01 4.00.01.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bayar Air	Inspektorat Daerah Kab. Muba	12 Bulan	APBD KAB	250,400,000		12 Bulan	250,400,000	
		Bayar Telpon		12 Bulan				12 Bulan		
		Bayar Internet		12 Bulan				12 Bulan		
		Bayar Listrik		12 Bulan				12 Bulan		
1.01 01 4.00.01.01 01 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Bayar Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4	Inspektorat Daerah Kab. Muba	10 Unit	APBD KAB	70,000,000		10 Unit	70,000,000	
1.01 01 4.00.01.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	Inspektorat Daerah Kab. Muba	10 Unit	APBD KAB	15,000,000		10 Unit	15,000,000	
1.01 01 4.00.01.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor	Inspektorat Daerah Kab. Muba	12 Bulan	APBD KAB	200,000,000		12 Bulan	200,000,000	

1.01	01	4.00.01.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhiya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Muba	12 Bulan	APBD KAB	200,000,000		12 Bulan	200,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya sarana listrik dan peralatan listrik yang dibutuhkan	Inspektorat Daerah Kab.Muba	12 Bulan	APBD KAB	50,000,000		12 Bulan	50,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab Muba	1 Per Pkt	APBD KAB	400,000,000		1 Per Pkt	400,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab.Muba	12 Bulan	APBD KAB	70,000,000		12 Bulan	70,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab. Muba	12 Bulan	APBD KAB	100,000,000		12 Bulan	100,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Inspektorat Daerah Kab. Muba	12 Bulan	APBD KAB	150,000,000		12 Bulan	150,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya program dinas melalui konsultasi luar daerah	N/A	12 Bulan	APBD KAB	400,000,000		12 Bulan	400,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tercapainya program dinas melalui konsultasi kedalam daerah	Inspektorat Daerah Kab. Muba	12 Bulan	APBD KAB	100,000,000		12 Bulan	100,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	01	20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Pembayaran honorarium tenaga Kontrak	Inspektorat Daerah Kab. Muba	12 Bulan	APBD KAB	671,400,000		12 Bulan	671,400,000	
1.01	01	4.00.01.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %		2,620,000,000		100 %	820,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhiya Jumlah Kendaraan dinas dalam melakukan pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Muba	4 Unit	APBD KAB	1,800,000,000				
1.01	01	4.00.01.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Terwujudnya sarana kerja yang memadai	Inspektorat Daerah Kab. Muba	1 Paket	APBD KAB	300,000,000		1 Paket	300,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Inspektorat Daerah Kab. Muba	1	APBD KAB	100,000,000		1	100,000,000	

1.01	01	4.00.01.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Muba	10 Unit	APBD KAB	350,000,000		10 Unit	350,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Muba	12 Bulan	APBD KAB	70,000,000		12 Bulan	70,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		100 %		130,000,000		100 %	130,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berpakaian Rapi	Kabupaten Musi Banyuasin	108 stel	APBD KAB	130,000,000		108 stel	130,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		100 %		50,000,000		100 %	50,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Bimtek terhadap SDM APIP	N/A	2 Orang	APBD KAB	50,000,000		2 Orang	50,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan sangat tepat		100 %		100,000,000		100 %	100,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	Kabupaten Musi Banyuasin	4 laporan	APBD KAB	50,000,000		4 laporan	50,000,000	
1.01	01	4.00.01.01	06	05	Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan kerja dan Penetapan Kinerja	Kabupaten Musi Banyuasin	4 laporan	APBD KAB	50,000,000		4 laporan	50,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			100%		9,072,350,000		100%	9,072,350,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Kabupaten Musi Banyuasin	60 LHP	APBD KAB	700,000,000		60 LHP	700,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	09	Pemeriksaan Sekolah Negeri dan Swasta	Jumlah laporan hasil audit Sekolah Negeri dan swasta	Kabupaten Musi Banyuasin	80 LHP	APBD KAB	400,000,000		80 LHP	400,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	10	Pemeriksaan OPD	Jumlah laporan hasil audit operasional Perangkat Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	43 LHP	APBD KAB	650,000,000	Seluruh PD	43 LHP	650,000,000	


4.00	02	4.00.01.01	20	11	Evaluasi SAKIP	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah minimal B	Kabupaten Musi Banyuasin	1 LHE	APBD KAB	100,000,000		1 LHE	100,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	12	Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Internal	Persentase hasil rekomendasi pemeriksaan APIP, yang ditindaklanjuti	Kabupaten Musi Banyuasin	2 ITLHP	APBD KAB	350,000,000		2 ITLHP	350,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	13	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan hasil review Keuangan Pemda yang sesuai SAP	Kabupaten Musi Banyuasin	1 LHR	APBD KAB	100,000,000		1 LHR	100,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	14	Evaluasi Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	Persentase hasil rekomendasi pemeriksaan BPK, yang ditindaklanjuti	Kabupaten Musi Banyuasin	2 ITLHP	APBD KAB	350,000,000		2 ITLHP	350,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	15	Pemeriksaan Khusus	jumlah laporan hasil pemeriksaan Khusus Kasus yang ditindaklanjuti	Kabupaten Musi Banyuasin	45 LHP	APBD KAB	600,000,000		45 LHP	600,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	16	Evaluasi LPPD	Laporan hasil Penilaian Mandiri LPPD	Kabupaten Musi Banyuasin	1 LHE	APBD KAB	100,000,000		1 LHE	100,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	17	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Persentase PD yang melaksanakan SPIP	Kabupaten Musi Banyuasin	1 LHE	APBD KAB	300,000,000		1 LHE	300,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	18	Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil audit dana Desa	Kabupaten Musi Banyuasin	114 LHP	APBD KAB	1,700,000,000		114 LHP	1,700,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	19	Pengawasan dan Pembinaan PNS Terpadu	Pelaksanaan SIDAK terhadap ASN Kab MUBA	Kabupaten Musi Banyuasin	15 LHP	APBD KAB	150,000,000		15 LHP	150,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	20	Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah pelaksanaan Sidang Majelis TP-TGR	Kabupaten Musi Banyuasin	7 Kali Sidang	APBD KAB	350,000,000		7 Kali Sidang	350,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	21	Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun Berikutnya	Kabupaten Musi Banyuasin	10 LHR	APBD KAB	350,000,000		10 LHR	350,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	23	Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah	laporan hasil review LKJIP	Kabupaten Musi Banyuasin	1 LHR	APBD KAB	100,000,000		1 LHR	100,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	24	Peningkatan Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah KabMuba	1 Laporan	APBD KAB	150,000,000		1 Laporan	150,000,000	

4.00	02	4.00.01.01	20	25	Pengawasan Reformasi Birokrasi	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (IRB) PMPRB	Kabupaten Musi Banyuasin	1 LHE	APBD KAB	150,000,000		1 LHE	150,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	26	Pengawasan Terhadap Optimalisasi PAD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pada perangkat daerah penghasil PAD	Kabupaten Musi Banyuasin	10 LHP	APBD KAB	200,000,000		10 LHP	200,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	27	Pemeriksaan Puskesmas	Jumlah laporan hasil pemeriksaan Pengelolaan Dana Jasa Layanan Kesehatan yang efektif, efisien dan tepat sasaran	Kabupaten Musi Banyuasin	56 LHP	APBD KAB	400,000,000		56 LHP	400,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	28	Pemeriksaan serentak Kas Opname	jumlah Laporan hasil audit kas opname serentak	Kabupaten Musi Banyuasin	20 LHP	APBD KAB	150,000,000		20 LHP	150,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	29	Evaluasi perencanaan penganggaran responsive Gender (PPRG)	Laporan hasil Evaluasi perencanaan penganggaran PPRG	Kabupaten Musi Banyuasin	1 LHE	APBD KAB	150,000,000		1 LHE	150,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	30	Audit pengadaan barang dan jasa (PBJ)	laporan hasil audit Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Kabupaten Musi Banyuasin	4 LHP	APBD KAB	172,350,000		4 LHP	172,350,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	31	Penilaian Zona Integritas (ZI)	PD yang dilakukan penilaian zona integritas	Kabupaten Musi Banyuasin	1 PD	APBD KAB	100,000,000		1 PD	100,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	32	Pengawasan Pungutan Liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Sosialisasi Pemerintahan Daerah yang bebas Pungli	Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	APBD KAB	100,000,000		1 Laporan	100,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	33	Pengendalian Gratifikasi	laporan hasil pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Perangkat Daerah	Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	APBD KAB	200,000,000		1 Laporan	200,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	34	Evaluasi Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelayanan Publik	Kabupaten Musi Banyuasin	10 LHE	APBD KAB	150,000,000		10 LHE	150,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	35	Koordinasi TP4D	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi TP4D	Kabupaten Musi Banyuasin	1 laporan	APBD KAB	100,000,000		1 laporan	100,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	36	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK-ASN)	Persentase Jumlah Pegawai yang memberikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kabupaten Musi Banyuasin	2 laporan	APBD KAB	150,000,000		2 laporan	150,000,000	

4.00	02	4.00.01.01	20	37	Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Verifikasi Laporan RADPPK	laporan hasil Verifikasi terhadap Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)	Kabupaten Musi Banyuasin	4 Laporan Hasil verifikasi	APBD KAB	150,000,000		4 Laporan Hasil verifikasi	150,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	xx	Penanganan Whistle Blower System	Terlaksananya pengawasan Whistle Blower System		1 Laporan	APBD KAB	100,000,000		1 Laporan	100,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	xx	Gelar Pengawasan Daerah	terlaksananya gelar pengawasan daerah		2 Laporan	APBD KAB	50,000,000		2 Laporan	50,000,000	
		4.00.01.01	20	xx	Pengawasan Dana Perbantuan	Terlaksananya pengawasan Dana Perbantuan		10 Laporan	APBD KAB	100,000,000		10 Laporan	100,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	xx	Penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya penanganan Benturan Kepentingan		1 laporan	APBD KAB	100,000,000		1 laporan	100,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	20	xx	Pelaksanaan Klinik Pelaksanaan Pengawasan (KPK)	Terlaksananya Klinik Pelaksanaan Pengawasan (KPK)		1 laporan	APBD KAB	100,000,000		1 laporan	100,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	21		Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat		94 %		705,000,000		94 %	705,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kabupaten Musi Banyuasin	10 Kali	APBD KAB	50,000,000		10 Kali	50,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	21	03	Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Khusus Pengawasan	Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat yang mengikuti diklat fungsional	Dalam dan Luar Daerah	5 Orang/Kali	\APBD KAB	175,000,000		5 Orang/Kali	175,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	21	04	Penilaian Angka Kredit	jumlah Pejabat fungsional inspektorat yang telah dilakukan penyusunan daftar usulan penilaian angka kredit	Inspektorat Daerah Kab. Muba	27 Orang	APBD KAB	80,000,000		27 Orang	80,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	21	05	Diklat Teknis Fungsional Pengawasan	Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah	30 Orang/Kali	APBD KAB	400,000,000		30 Orang/Kali	400,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	22		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		100 %		270,000,000		100 %	270,000,000	

4.00	02	4.00.01.01	22	02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	PKPT Berbasis Resiko	Inspektorat Daerah Kab. Muba	1 laporan	APBD KAB	200,000,000		1 laporan	200,000,000	
4.00	02	4.00.01.01	22	03	Penerapan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP)	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Muba	1 Dokumen	APBD KAB	70,000,000		1 Dokumen	70,000,000	
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG :										13.855.482.760			13.855.482.760	
TOTAL BELANJA LANGSUNG :										15.624.150.000			13.824.150.000	
TOTAL BELANJA PD (BTL + BL) :										29.479.632.760			27.679.632.760	

INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


 Drs. H. R.E. AIDIL FITRI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196812201988101002

BAB IV

PENUTUP

5

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan mengacu pada Rencana kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin 2020. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2019.

Untuk penyempurnaan Rencana Kerja ini, kami sangat membutuhkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga pada masa yang akan datang dapat diadakan perbaikan/revisi kembali sesuai dengan perkembangannya.

Pada akhirnya diharapkan dapat direalisasikan sebuah Rencana Kerja yang benar-benar handal untuk dipedomani sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya dan Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya.

Sekayu, Januari 2019

INSPEKTUR
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. R.E. AIDIL FITRI
Pembina Utama Muda
NIP 19681220 198810 1 002